



asip / 2019

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon 024-8319140, Facimile 024-8319328 Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id, Laman : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

PROPOSAL USULAN RENCANA KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM	:	Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah
KEGIATAN		Tata Kelola Persandian
1. Latar Belakang		
a. Kondisi Eksisting	:	Dalam Perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi dewasa ini, Telekomunikasi merupakan instrumen pendukung percepatan mekanisme komunikasi dan informasi Pemerintahan secara cepat, tepat dan transparan, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dan akses informasi. Berlangsungnya suatu kegiatan pemasyarakatan / proses sosialisasi suatu ketentuan / undang-undang sampai kepada hal-hal yang mengatur tatanan pelaksanaan akan berlangsung dengan baik, apabila dikomunikasikan dengan aman, utuh, efektif dan efisien. Perkembangan Teknologi Komunikasi yang pesat dapat berdampak pada kerawanan adanya kebocoran dan penyalahgunaan informasi, maka dari itu diperlukan upaya peningkatan kemampuan dan kualitas SDM serta penambahan perangkat pendukung sarana komunikasi melalui berbagai jenis pembinaan agar mampu menyelaraskan perkembangan teknologi saat ini. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah yang dilakukan secara periodik berkelanjutan.
b. Permasalahan	:	1. Terbatasnya Peralatan Pendukung Persandian dan Keamanan Informasi. 2. Terbatasnya Kapasitas SDM (PNS) yang memiliki kemampuan/spesifikasi bidang <i>IT Security</i>. 3. Kurangnya <i>Awareness</i> dari Pejabat/pengambil kebijakan serta PNS terhadap pentingnya keamanan informasi. 4. Terbatasnya dukungan anggaran.

Dinas Program
22/11/19

2. Maksud dan Tujuan	:	1. Meningkatkan kapasitas sumber daya persandian dan keamanan informasi 2. Meningkatkan sistem keamanan informasi, baik yang disimpan maupun dipertukar kirimkan. 3. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, <i>Assessment</i>, analisis dan rekomendasi terhadap sumber daya dan sistem informasi dari ancaman, serangan, kerusakan dan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Sasaran	:	1. Sistem informasi pemerintah daerah yang aman. 2. Terselenggaranya fungsi persandian dalam pengamanan jaring komunikasi pemerintah daerah. 3. Terpenuhinya jaminan keamanan informasi, 4. Terpenuhinya sumber daya pendukung persandian.
a. Fokus Pekerjaan	:	1. Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM bidang persandian dan keamanan informasi. 2. Penyelenggaraan Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi. 3. Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi. 4. Kegiatan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi. 5. Tindak lanjut rekomendasi Audit Keamanan Informasi (standart Indeks KAMI) yang dilaksanakan pada akhir 2018 guna peningkatan indeks kematangan keamanan informasi Pemprov. Jateng.
b. Lokasi Pekerjaan	:	Pusat dan Kab/Kota
4. Keluaran/Output	:	Peningkatan Sumber Daya Persandian dan Keamanan Informasi dengan Pengadaan Peralatan pendukung persandian dan keamanan informasi dan Keningkatan Kapasitas SDM Persandian dan Keamanan Informasi serta Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi.
5. Hasil / Outcome	:	Kegiatan Pelatihan / Bintek / Rakor / Sosialisasi dan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring serta Evaluasi Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi.

6. Dampak / Impact	:	1. Mempunyai Database/Cloud sendiri untuk penyimpanan Reporting atau hasil <i>Penetration Testing</i> (Pentes). 2. Terciptanya jaminan keamanan informasi dan komunikasi yang bersifat strategis/rahasia maupun informasi biasa pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 3. Tersedianya Sumber Daya Persandian yang profesional dan memadahi 4. Tersedianya Regulasi dan Standarisasi pengamanan penyelenggaraan persandian di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kebutuhan Pendanaan	:	865,909,000,-
8. Jadwal Pelaksanaan	:	12 bulan
9. Foto Kondisi 0%	:	

Semarang, November 2019

Disusun oleh :
Kepala Seksi Tata Kelola Persandian


ENY SOELASTRI, SH.
 Penata Tingkat I
 NIP. 197005151990012001

Diketahui oleh :
Plt. Kepala Bidang Persandian
dan Keamanan Informasi


AKHMAD SYAIFILLAH, ATD, MT.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196504251988031008

A. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PELAKSANAAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
1	Kegiatan Tata Kelola Persandian	865.909.000												
	1. Belanja Pegawai	48.400.000												
	2. Belanja Barang dan Jasa	817.509.000												
	a. Belanja Habis Pakai	157.979.000												
	b. Belanja Jasa Kantor	83.300.000												
	c. Belanja Premi Asuransi	1.500.000												
	d. Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000												
	e. Belanja Sewa Gedung/Hotel	181.440.000												
	f. Belanja Makan Minum	128.970.000												
3.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Koordinasi, Konsultasi, Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring ke dalam/luar daerah)	263.220.000												
	Dalam Daerah	111.710.000												
	Luar Daerah	151.510.000												

Disusun oleh :
Kepala Seksi Tata Kelola Persandian


ENY SOELASTRI, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 197005151990012001

Semarang, November 2019

Diketahui oleh :
Plt. Kepala Bidang Persandian
dan Keamanan Informasi


AKHMAD SYAIFILLAH, ATD, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251988031008